

KEBIJAKAN PELAPORAN KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN **DEWAN KOMISARIS** PT ITAMA RANORAYA Tbk

PT Itama Ranoraya Tbk

Office 1: ITS Tower, 21st Floor Nifarro Park Jl. KH. Guru Amin No. 18, Pasar Minggu, South Jakarta, 12510 Indonesia

Office 2: MT Haryono Square 1st Floor Unit 01

JI Otto Iskandardinata Raya No. 390 East Jakarta, 13330 Indonesia



(+62 21 2906 7207



+62812 2222 6501



www.itama.co.id





DAFTAR ISI

BABI	PENDAHULUAN	2
A.	Latar Belakang	2
В.	Landasan Hukum	2
C.	Tujuan	2
BAB II	PELAPORAN KEPEMILIKAN DAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM	3
A.	Kewajiban Pelaporan	3
B.	Bentuk dan Isi Pelaporan	3
A.	Mekanisme Pelaporan	3
В.	Jangka Waktu Pelaporan	4
C.	Kewajiban Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan	4
BAB II	I PENUTUP	5
LAMPI	RAN I	6
LAMPI	RAN II	8



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

PT Itama Ranoraya Tbk ("Perseroan") sebagai perusahaan distribusi alat kesehatan berkomitmen mengimplementasikan *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten dengan mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama peraturan di bidang pasar modal.

Dalam upaya meningkatkan penerapan prinsip-prinsip GCG dalam pelaksanaan kegiatan usahanya, terkhusus prinsip transparansi, maka dibentuk dan ditetapkan Kebijakan Pelaporan Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris ("Kebijakan"). Kebijakan ini dibentuk sebagai bentuk kepatuhan Perseroan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.

B. Landasan Hukum

- 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan perubahannya;
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan perubahannya;
- 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.

C. Tujuan

Kebijakan ini dibuat dan ditetapkan dengan tujuan sebagai pedoman bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dalam menjalankan kewajiban untuk menyampaikan informasi mengenai kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan. Adanya kebijakan ini memastikan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang berlaku. Dengan demikian, melalui transparansi ini diharapkan hubungan Perseroan dengan pemegang saham semakin sinergi.



BAB II

PELAPORAN KEPEMILIKAN DAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM

A. Kewajiban Pelaporan

Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung.

B. Bentuk dan Isi Pelaporan

Bentuk dan isi laporan harus dibuat dan disusun sesuai dengan format yang ditentukan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 Tahun 2017, antara lain meliputi:

- 1. Nama, tempat tinggal, dan kewarganegaraan.
- 2. Nama saham Perseroan.
- 3. Jumlah saham dan persentase kepemilikan saham sebelum dan setelah transaksi.
- 4. Jumlah saham yang dibeli atau dijual.
- 5. Harga pembelian atau penjualan per saham.
- 6. Tanggal transaksi.
- 7. Tujuan dari transaksi.
- 8. Status kepemilikan saham (langsung atau tidak langsung).
- Dalam hal kepemilikan saham secara tidak langsung, diungkapkan informasi mengenai pemegang saham yang tercatat di daftar pemegang saham Perseroan untuk kepentingan pemilik manfaat.

C. Mekanisme Pelaporan

- 1. Pelaporan Sendiri
 - a. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham dalam Perseroan secara langsung kepada OJK menggunakan format pada Lampiran I Kebijakan ini;
 - b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang telah melaporkan wajib menyampaikan salinan pelaporan tersebut kepada Perseroan melalui Sekretaris Perseroan (Corporate Secretary) pada hari yang sama untuk keperluan dokumentasi.
- 2. Pelaporan Melalui Kuasa



- a. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang akan melaporkan kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham dalam Perseroan, dengan melampirkan Surat Kuasa Khusus ("SKK") dalam format pada Lampiran II Kebijakan ini dan disampaikan kepada Corporate Secretary;
- b. pelaporan melalui Kuasa dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - menyerahkan bukti transaksi saham paling lambat 2 (dua) hari kalender setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham; dan
 - menyerahkan Kuasa kepada Corporate Secretary paling lambat 2 (dua) hari kalender setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham.
- Corporate Secretary kemudian akan menyampaikan laporan kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham dalam Perseroan tersebut kepada OJK.

D. Jangka Waktu Pelaporan

- 1. Pelaporan Sendiri
 - a. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris melaporkan kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan atas saham kepada Perseroan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham dalam Perseroan.
 - b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris wajib menyampaikan pelaporan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham dalam Perseroan.

2. Pelaporan Melalui Kuasa

- Pelaporan yang dilakukan melalui kuasa wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham dalam Perseroan dengan disertai dengan salinan SKK.
- Dalam hal batas waktu penyampaian laporan tersebut jatuh pada hari libur, laporan kepemilikan saham wajib disampaikan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

E. Kewajiban Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan

Pelaksanaan atas Kebijakan Pelaporan Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris ini wajib diungkapkan oleh Perseroan dalam laporan tahunan atau situs web Perseroan.



BAB III PENUTUP

Kebijakan Pelaporan Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan, dan akan dievaluasi serta disempurnakan untuk disesuaikan dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebutuhan Perseroan.

Ditetapkan Jakarta, 22 Mei 2025

Tjandra Yoga Aditama

Komisaris Utama

Wirdhan Denny

Komisaris

Alvi Syahri Ramadhan Nasution

Komisaris Independen

Heru Firdausi Syarif Direktur Utama

Direktur Otama

Hendry Herman

Direktur

Teguh Eko Purwanto

Direktur

Viertin M.L. Tobing

Direktur



LAMPIRAN I FORMAT LAPORAN KEPEMILIKAN ATAU PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM

LAPORAN KEPEMILIKAN ATAU SETIAP PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA

Nomor	•	,
Lampiran	:	
Perihal	:	
		-
		Kepada
		Yth. Kepala Eksekutif Pengawas
		Pasar Modal
		Otoritas Jasa Keuangan
		di Jakarta
Sava vang	bertanda tangan di bawah ini:	
Nama	7411 2011/04 2011 =	
Alamat ler	ngkap :	
	(nama jalan dan no	mor)
Nomor tele	epon :	
Kewargane	egaraan :	
sesuai de	engan Pasal Peraturan Otoritas	Jasa Keuangan Nomor
	eterbukaan Informasi Pemegang Sal	
telah mem	iliki saham Perusahaan Terbuka d	engan rincian sebagai berikut:
1. Na	ama saham Perusahaan Terbuka	
	ımlah saham dan persentase pemilikan saham sebelum dan	
	telah transaksi	
	ımlah saham yang dibeli atau	
dij	ual	
4. Ha	arga pembelian atau penjualan per	



	saham	
5.	Tanggal transaksi	
6.	Tujuan dari transaksi	
7.	Status kepemilikan saham	Langsung
		☐ Tidak Langsung
		Penjelasan:
	4 (2.19)	(diisi informasi mengenai
		pemegang saham yang
		terdaftar dalam daftar
		pemegang saham untuk
		kepentingan pemilik
		manfaat)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

(nama jelas dan tanda tangan)



LAMPIRAN II SURAT KUASA KHUSUS

Secretary of the last	Itama Ranoraya	(d) +62 21 2906 720	07 💮 +62 21 2906 7208	www.itama
		SURAT KUASA		
	Yang bertanda tangan di baw	ah ini:		
	Nama : Alamat :			
	NIK :			
	Untuk selanjutnya disebut sel	bagai Pemberi Kuasa;		
	Memberi Kuasa kepada:			
	Nama : Alamat :			
	NIK :			
	Untuk selanjutnya disebut se	bagai Penerima Kua sa;		
		KHUSUS		
	Keuangan (OJK).			
	Demikian surat kuasa ini si siapapun, dan semoga diperg			dari
	Demikian surat kuasa ini sa			dari
	Demikian surat kuasa ini sa	unakan sebagaimana me		
	Demikian surat kuasa ini sa	unakan sebagaimana me Jakarta,	estinya.	
	Demikian surat kuasa ini si siapapun, dan semoga diperg	unakan sebagaimana me Jakarta,	estinya. (tanggal)(bulan)(ta	
	Demikian surat kuasa ini si siapapun, dan semoga diperg	unakan sebagaimana me Jakarta,	estinya. (tanggal)(bulan)(ta	
	Demikian surat kuasa ini si siapapun, dan semoga diperg	unakan sebagaimana me Jakarta,	estinya. (tanggal)(bulan)(ta	
	Demikian surat kuasa ini si siapapun, dan semoga diperg	unakan sebagaimana me Jakarta,	estinya. (tanggal)(bulan)(ta	
	Demikian surat kuasa ini si siapapun, dan semoga diperg Pemberi Kuasa	unakan sebagaimana me Jakarta,	estinya. (tanggal)(bulan)(ta Penerima Kuasa	
	Demikian surat kuasa ini si siapapun, dan semoga diperg	unakan sebagaimana me Jakarta,	estinya. (tanggal)(bulan)(ta	
	Demikian surat kuasa ini si siapapun, dan semoga diperg Pemberi Kuasa	unakan sebagaimana me Jakarta,	estinya. (tanggal)(bulan)(ta Penerima Kuasa	
	Demikian surat kuasa ini si siapapun, dan semoga diperg Pemberi Kuasa	unakan sebagaimana me Jakarta,	estinya. (tanggal)(bulan)(ta Penerima Kuasa	
	Demikian surat kuasa ini si siapapun, dan semoga diperg Pemberi Kuasa	unakan sebagaimana me Jakarta,	estinya. (tanggal)(bulan)(ta Penerima Kuasa	
	Demikian surat kuasa ini si siapapun, dan semoga diperg Pemberi Kuasa	unakan sebagaimana me Jakarta,	estinya. (tanggal)(bulan)(ta Penerima Kuasa	
	Demikian surat kuasa ini si siapapun, dan semoga diperg Pemberi Kuasa	unakan sebagaimana me Jakarta,	estinya. (tanggal)(bulan)(ta Penerima Kuasa	